



# **KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



# Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dalam rangkaian pekerjaan Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 diselenggarakan oleh **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur**.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

Samarinda, April 2018

# Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Pustaka .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>I – 1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I – 1
1.2 Tujuan .....	I – 3
1.3 Sasaran .....	I – 3
1.4 Ruang Lingkup .....	I – 3
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah .....	I – 3
1.4.2 Ruang Lingkup Materi .....	I – 4
1.5 Metodologi .....	I – 5
1.6 Kerangka Pemikiran .....	I – 12
1.7 Keluaran .....	I – 13
1.8 Sistematika Pembahasan .....	I – 13
<b>BAB 2 KONDISI PEREKONOMIAN DAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>II – 1</b>
2.1 Kebijakan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 1
2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	II – 1
2.1.2 Peraturan – Peraturan Tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal .....	II – 7
2.2 Potensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 14
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 15
2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 - 2016 .....	II – 17
2.2.3 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 18
2.2.4 Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 19
2.3 Potensi Investasi Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 20
2.3.1 Perkembangan Investasi Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 20

2.3.2	Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 24
<b>BAB 3</b>	<b>PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>III – 1</b>
3.1	Pengaruh Kebijakan Insentif .....	III – 1
3.2	Pengaruh Kebijakan Kemudahan Investasi .....	III – 4
3.3	Kendala Implementasi Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi .....	III – 5
3.3.1	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Investasi.....	III – 6
3.3.2	Kendala Implementasi Kebijakan Investasi .....	III – 9
3.3.3	Daya Tarik Investasi Menurut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	III – 11
3.4	Analisis SWOT Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi.....	III – 12
3.4.1	Identifikasi Faktor Internal.....	III – 12
3.4.2	Identifikasi Faktor Eksternal.....	III – 13
<b>BAB 4</b>	<b>STRATEGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI</b>	<b>IV – 1</b>
4.1	Strategi Pengembangan Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi .....	IV – 1
4.2	Arahan dan Strategi Kebijakan .....	IV – 6

# Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Prioritas Pembangunan RPJMN dan Prioritas Pembangunan RPJMD ....	II – 6
Tabel 2.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah.....	II – 6
Tabel 2.3 Bidang Usaha Tertutup .....	II – 7
Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur .....	II – 16
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan (LPE) Provinsi Kalimantan Timur Tahun .....	II – 17
Tabel 2.6 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.....	II – 18
Tabel 2.7 Nilai Location Quotient (LQ) Provinsi Kalimantan Timur.....	II – 19
Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor Tahun 2016 .....	II – 21
Tabel 2.9 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor Tahun 2016 .....	II – 22
Tabel 2.10 Nilai ICOR Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.....	II – 24
Tabel 3.1 Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Insentif .....	III - 10
Tabel 3.2 Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Kemudahan Investasi .....	III - 11
Tabel 3.3 Matriks SWOT .....	III - 15
Tabel 4.1 Fokus Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Sektor di Provinsi Kalimantan Timur .....	IV – 2



# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Menurut Syaihu (2012) bahwa investasi swasta dan investasi pemerintah di Provinsi Kalimantan memberikan pengaruh secara bersama - sama terhadap kesempatan kerja, investasi swasta dan investasi pemerintah juga memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pengangguran. Hal itu sejalan dengan Sadono Sukirno (2000:143) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya

menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi, 2002:8). Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerja pun akan meningkat.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang “conducive”, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalin kerjasama sinergis antardaerah.

Kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang atau pelayanan yang berkualitas. Pada hakekatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain baik dari luar maupun dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana kegiatan penanaman modal merupakan pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan produktif.

Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian. Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Menurut Tambunan (2001:76) investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi

jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan di pasar. Pendapat tersebut menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, dimana munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai adalah **menentukan arahan pemberian insentif terhadap penanaman modal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.**

## **1.3. Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Identifikasi Potensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur;
2. Identifikasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Identifikasi Kebijakan Insentif Terhadap Penanaman Modal; dan
4. Penentuan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

## **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam kajian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. lingkup materi merupakan batasan terhadap materi yang menjadi batasan dalam kajian ini, sedangkan lingkup wilayah merupakan batasan terhadap wilayah yang menjadi objek kajian. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

### **1.4.1. Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup yang dikaji dalam kajian ini adalah wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 127.346,92 km<sup>2</sup> yang terletak antara 113°35'31" dan 119°12'48" bujur timur, dan antara 2°34'23" lintang utara dan 2°44'14" lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya memiliki batas - batas:

- Utara : Provinsi Kalimantan Utara;
- Selatan : Kalimantan Selatan;
- Barat : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Negara Malaysia;
- Timur : Laut, Sulawesi dan Selat Makasar.

### **1.4.2. Lingkup Materi**



Lingkup materi dalam kajian ini perlu dibatasi supaya lebih terarah serta berjalan dengan baik, Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

### **1. Membahas Potensi Ekonomi Wilayah**

Pembahasan tentang potensi ekonomi wilayah diperlukan dalam melihat potensi ekonomi, jenis sektor unggulan yang sudah dimiliki atau potensial untuk dikembangkan, serta melihat seberapa jauh sektor tersebut akan dapat mendorong proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Potensi ekonomi wilayah dilihat menggunakan dua pendekatan melalui potensi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan melihat potensi sektor Basis.

#### a) Melihat Potensi PDRB

Potensi PDRB bertujuan untuk melihat nilai produksi yang dihasilkan oleh setiap sektor selama 5 tahun yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu dapat dilihat juga struktur perekonomian yang ada, dan laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 5 tahun.

#### b) Melihat Potensi Sektor Basis

Potensi sektor basis merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan, sektor – sektor yang menjadi pemacu pertumbuhan (basis) basis dapat meningkatkan ekspor yang secara jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Potensi sektor basis menggunakan analisis location quotient (LQ). Menurut Rusasta et al (2002) LQ merupakan suatu alat pengembangan ekonomi yang mengukur derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan, ada 2 klasifikasi sektor dalam metode analisis LQ yaitu sektor basis dan sektor non basis.

### **2. Investasi**

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000: 367). Investasi yang dibahas adalah investasi PMDN dan PMDA terhadap sektor di Provinsi Kalimantan. Adapun pendekatan yang digunakan untuk melihat potensi investasi di Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari tiga pendekatan berikut:

- a) Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Timur.  
Melihat perkembangan investasi di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 5 tahun;
- b) Pengaruh Perkembangan Investasi dan Kemudahan Penanaman Modal.  
Melihat pengaruh perkembangan investasi di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 5 tahun menggunakan pendekatan analisis regresi berganda;
- c) Melihat *Efisiensi* Penggunaan Modal (Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi).  
Melihat nilai *efisiensi* Penggunaan Modal (Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dengan pendekatan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*).

### **3. Insentif**

Insentif yang dibahas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 yaitu Insentif yang berupa dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Adapun pendekatannya melalui penelusuran pustaka terhadap tinjauan peraturan daerah tentang investasi dan kemudahan investasi di pusat dan di provinsi Kalimantan timur.

### **1.5. Metodologi**

Kajian ini menggunakan beberapa pendekatan utama, yaitu pendekatan perencanaan berbasis stakeholders. Model pendekatan dalam studi penyusunan kebijakan strategik ini dikembangkan secara partisipatif (*participatory approach*). Pendekatan ini menjembatani dua kutub kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat umum, swasta/pelaku usaha, dan dari pemerintah sehingga tumpuan analisis lebih dititik beratkan pada pemenuhan kebutuhan stakeholders. Kajian ini berorientasi kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan penanaman modal secara substantif berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek penyediaan barang dan jasa, kesempatan kerja, dan penciptaan nilai tambah. Adanya peningkatan penanaman modal juga akan meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang berimplikasi pada peningkatan sumber-sumber APBD sehingga dana publik tersebut dapat dialokasikan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, secara langsung diyakini kegiatan ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Kajian ini mengambil sampel di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data utama maupun data pendukung, baik data yang bersifat primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dipandu kuesioner; dokumentasi; dan untuk menggali data yang berhubungan dengan pengembangan penanaman modal di daerah. Analisis yang digunakan untuk merumuskan kebijakan strategik untuk akselerasi penanaman modal di daerah menggunakan alat analisis:

**(1) Studi Kepustakaan**

Analisis ini digunakan untuk mereview berbagai data dan informasi yang terkumpul dari dokumen-dokumen perencanaan, hasil penelitian, buku dan peraturan yang relevan.

**(2) Analisis Ekonomi**

Analisis Ekonomi yang digunakan untuk melihat potensi wilayah ekonomi dari mulai struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, Laju pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 5 tahun, Analisis Sektor Basis, Analisis efisiensi nilai investasi di Provinsi Kalimantan (*ICOR*). Analisis Ekonomi yang digunakan adalah:

**a) Analisis PDRB Wilayah**

Perhitungan pendapatan regional atau wilayah (PDRB) akan memberikan suatu latar belakang dan perspektif mengenai pendapatan daerah dan gambaran keadaan masyarakatnya. Kegunaan analisis PDRB Untuk melihat gambaran perekonomian dan perkembangan ekonomi suatu wilayah, baik secara makro maupun sektoral dan Indikator gambaran dan perkembangan ekonomi. Analisis PDRB yang dilihat adalah :

➤ **Tingkat pertumbuhan ekonomi**

Perhitungan LPE untuk data PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara dihitung secara langsung dari data PDRB/pendapatan riil yang ada.

Rumus LPE atas dasar harga konstan:

$$\frac{\text{PDRB}_n \text{ (riil)} - \text{PDRB}_{n-1} \text{ (riil)}}{\text{PDRB (riil)}_{n-1}} \times 100\%$$

➤ Struktur perekonomian

Berdasarkan besar kontribusi/peranan/sumbangan dari masing-masing sektor terhadap jumlah PDRB/pendapatan secara keseluruhan dari suatu daerah dapat ditentukan corak atau karakteristiknya, apakah termasuk daerah berkarakteristik pertanian, industri atau kegiatan lainnya.

Rumus Kontribusi Sektor:

$$\frac{\text{Nilai PDRB Sektor } i}{\text{Nilai PDRB total}} \times 100\%$$

**b) Analisis LQ**

Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam 2 (dua) sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep – konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas, nodalitas dan konsep administrasi. Dijelaskan oleh Rusastra *et al* (2002) bahwa yang dimaksud dengan kegiatan basis adalah suatu kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa dan ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis ini.

Secara garis besar gambaran dari alat analisis ini adalah sebagai berikut:

- Teknik analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu.
- Teknik analisis *Location Quotient* (LQ) telah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati.

$$LQ = \frac{X_r/R_r}{X_n/R_n}$$

Keterangan:

Xr: nilai sektor / industri x dalam sub region

Xn: nilai sektor / industri x dalam region

Rr: total nilai sektor / industri x dalam sub region

Rn: total nilai sektor / industri x dalam region

Nilai LQ dapat memberikan gambaran apakah daerah yang diteliti telah mengalami keseimbangan atau belum dalam kegiatan tertentu. Secara lebih jelas indikasi berdasarkan nilai LQ sebagai berikut:

1. **LQ > 1**: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor basis).
2. **LQ < 1**: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki kecenderungan impor dari daerah lain dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor non basis).
3. **LQ = 1**: memberikan arti daerah yang diselidiki telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang).

### c) ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output (Badan Pusat Statistik, 2009). Widodo (1990) menyatakan bahwa secara umum, nilai *ICOR* yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik antara 3 – 4, semakin tinggi *ICOR* memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. *ICOR* yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya teknologi. Menurut teori Solow Swan tingkat kemajuan teknologi adalah salahsatu faktor produksi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1988). Dalam kajian ini memberikan asumsi bahwa nilai ICOR yang efisien adalah kurang dari 4, dan tidak efisien jika memiliki nilai ICOR lebih dari 4. Penelitian akan menghitung ICOR provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 - 2016, dengan perhitungannya sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Dimana K = perubahan capital

Y = perubahan output

**Keterangan :**

1.  $\Delta X$  = Nilai Invetasi
2.  $\Delta Y$  = PDRB tahun t - PDRB tahun t -1

(3) Deskriptif Kualitatif untuk kebijakan publik.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kecenderungan kebutuhan kebijakan publik yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan bidang penanaman modal.

(4) Analisis SWOT

Suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan kebijakan berbagai strategi pengembangan penanaman modal daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal strengths dan weaknesses serta lingkungan eksternal oportunities dan threats yang dihadapi institusi/lembaga. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategik.

a. *Strength* (kekuatan)

Merupakan potensi yang sangat unit/potensial, bahkan tidak dapat ditemukan ditemukan ditempat lain, seperti karakter fisik yang berkaitan dengan sumber daya alam tertentu, karakter sosial dan budaya, karakter ekonomi, dan sebagainya.

b. *Weakness* (kelemahan)

Permasalahan yang timbul selalu menjadi penghambat pertumbuhan wilayah, sehingga perkembangan dirasakan kurang terencana dan terkontrol.

c. *Opportunity* (peluang)

Potensi yang dimiliki suatu wilayah, terutama yang cenderung berorientasi pasar akan mengibas secara nyata bagi pertumbuhan kawasan dimasa datang, sehingga memberikan peluang optimis dalam pengembangannya maupun dalam menarik minat insvestor.

d. *Threat* (hambatan)

Potensi yang dimiliki, dapat pula menjadi ancaman bagi daerah yang kurang atau belum mampu / belum siap menerima tekanan perkembangan wilayah di sekitarnya, sehingga berakibat kurang menguntungkan dan pada akhirnya keuntungan akan tersedot oleh daerah-daerah disekitarnya yang sudah siap (modal luar). Seperti kebijakan pembangunan dalam era ekonomi daerah, dimana daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam akan mengalami pengembangan yang signifikan, tetapi akan menimbulkan ancaman atau hambatan apabila suatu daerah tidak hati-hati dalam mengelolanya.

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Matriks SWOT Kearns

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGTH	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
WEAKNESS	<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Sumber: Hisyam, 1998

**Gambar 1. 1 Matriks SWOT Kearns**

**Keterangan:**

Sel A: *Comparative Advantages*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu wilayah untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Disini harus dilakukan

upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan wilayah untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu

menjadi sebuah peluang.

Sel C: *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan wilayah dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D: *Damage Control*

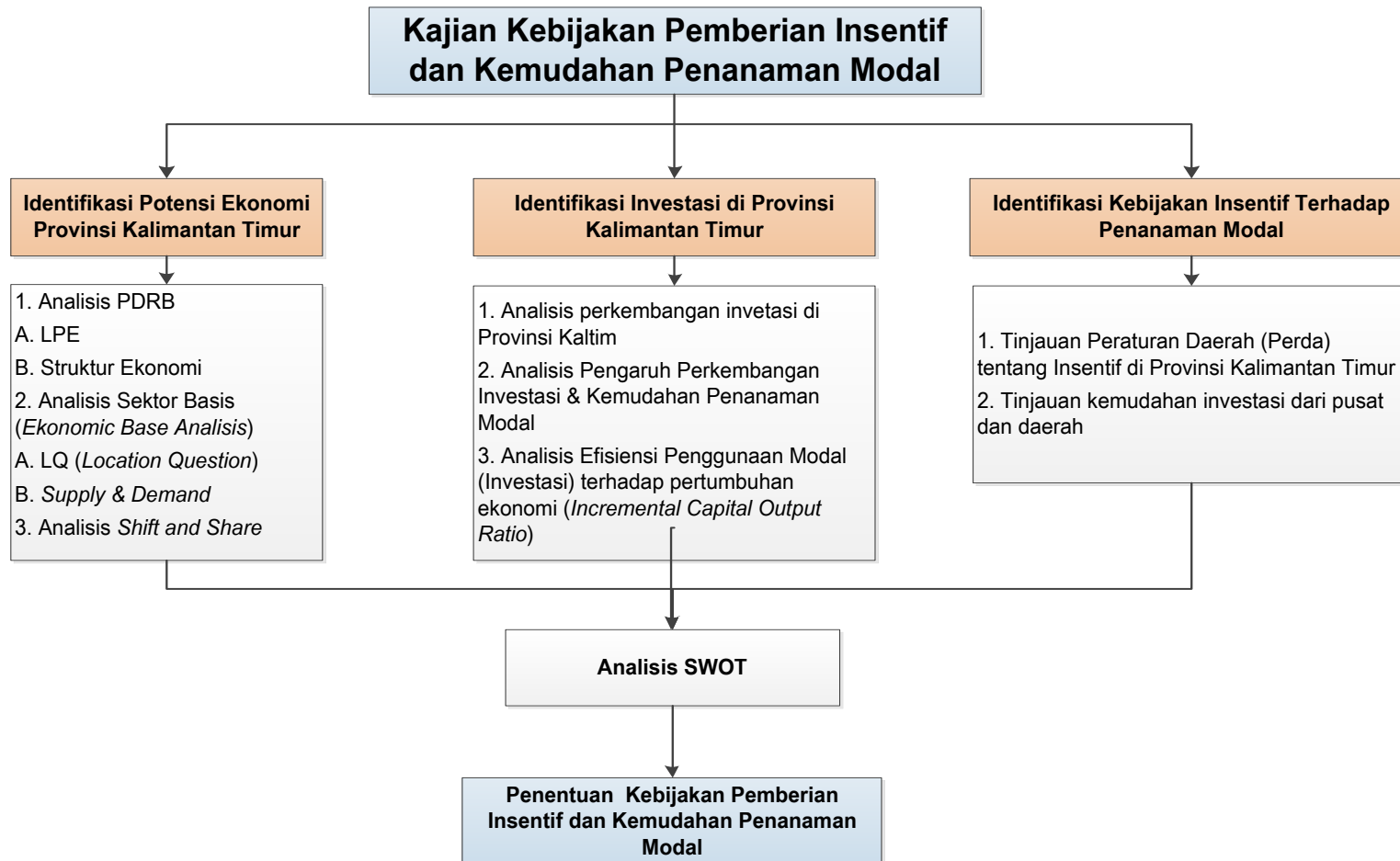
Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan wilayah dengan ancaman dari luar, dan karenanya

keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi wilayah. Strategi

yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.



## 1.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 2 Kerangka Alur Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

## **1.7. Keluaran**

Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Keluaran yang dihasilkan adalah dokumen arahan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Laporan hasil kegiatan.

## **1.8. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan laporan ini terdiri dari lima bab, adapun penjelasan dari masing – masing bab dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, metodologi, kerangka pemikiran dan keluaran kegiatan.

### **BAB 2 KONDISI PEREKONOMIAN DAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Bab ini menjelaskan kebijakan terhadap perekonomian, Peraturan – peraturan yang berlaku tentang kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur, potensi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, dan potensi investasi di Provinsi Kalimantan Timur.

### **BAB 3 PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Bab ini menjabarkan tentang pengaruh kebijakan insentif, pengaruh kebijakan kemudahan investasi, kendala implementasi kebijakan insentif dan kemudahan investasi, dan analisis SWOT tentang kebijakan insentif dan Kemudahan Investasi.

### **BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Bab ini menjabarkan dari strategi pengembangan kebijakan insentif dan kemudahan investasi, arahan dan strategi kebijakan, strategi pemberian insentif dan strategi pemberian kemudahan investasi di Provinsi Kalimantan Timur.



# BAB 2

## KONDISI PEREKONOMIAN DAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### 2.1 Kebijakan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

#### 2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan andalan nasional dan kawasan strategis nasional, adapun kawasan andalan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya.
2. Kawasan Andalan Sangkulirang – Sengatta - Muara Wahau (SASAMAWA).
3. Kawasan Andalan Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM) dan sekitarnya.
4. Kawasan Andalan Laut Bontang – Tarakan dan sekitarnya.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:

- a. Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
- b. Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan
- c. Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.

Permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur, semakin melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mengurangi permasalahan

di Provinsi Kalimantan Timur maka dibuatlah visi dan misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah

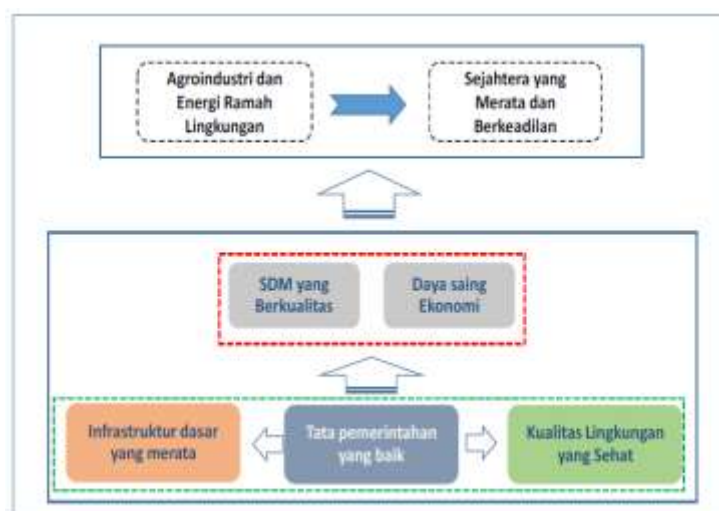
**“Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis  
Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan”**

**Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah**

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Keterkaitan Visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah dapat dilihat pada diagram di bawah:



**Gambar 2. 1 Keterkaitan Visi dan Misi**

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

#### **1) Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Mutu kesehatan masyarakat yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 6,00 persen;
2. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 7,00 persen;
3. Meningkatnya standar hidup layak, dengan capaian paritas daya beli sebesar 11.800 ribu per kapita/tahun;
4. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat tingkat inflasi sebesar  $4 \pm 1$  persen dengan Indeks Tendensi Konsumen sebesar 106,8 ; dan
5. Menurunnya Indeks Gini, dengan capaian indeks gini sebesar 0,32.

## **2) Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya melalui pengurangan emisi GRK, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, memberikan peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi.

Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan timur dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi yang berkelanjutan dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan dan hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar 0,5 + 1 persen (LPE migas), 1 + 1 persen (LPE non migas), dan 4 + 1 persen (LPE non migas dan non batubara);
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dengan capaian indikator kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 10,00 persen dan didukung pula dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 5 + 1 persen;
3. Tercapainya swasembada pangan, dengan capaian indikator rasio pemenuhan beras sebesar 85,00 persen; dan
4. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan, dengan capaian indikator bauran energy baru terbarukan sebesar 3,00 persen.

### 3) Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,00 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 85 (sangat baik);
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 80,00 (A) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”.

#### Strategi dan Arah kebijakan

Untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maka strategi atau prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional (**Nawacita**) harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1 Prioritas Pembangunan RPJMN dan Prioritas Pembangunan PJMD**

Nawacita (Prioritas Pembangunan RPJMN)		Prioritas Pembangunan RPJMD	
1	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat
2	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa asia lainnya	1	Percepatan pengentaskan kemiskinan
		2	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik	1	Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
		2	Peningkatan skala produksi pertanian
		3	Percepatan transformasi ekonomi
		4	Peningkatan produksi pangan
		5	Pemenuhan energy ramah lingkungan
		6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, 2013

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional (Nawacita) dan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur maka disusun strategi pembangunan jangka menengah dalam bidang ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah**

Sasaran		Strategi/Prioritas Pembangunan
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Percepatan pengentaskan kemiskinan
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
3	Meningkatkan standar hidup layak	Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
4	Meningkatkan daya beli masyarakat	
5	Menurunnya index Gini	

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, 2013



## **2.1.2 Peraturan – Peraturan tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Peraturan – peraturan yang mengatur tentang insentif di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan peraturan gubernur.

### **2.1.2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.

- 1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. Pemberian ban tuan modal.
- 2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. Percepatan perriberian perizinan.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- a. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

1. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau m. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### 2.1.2.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal bahwa bidang usaha terbagi menjadi dua yaitu:

#### 1) Bidang Usaha Terbuka

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

#### 2) Bidang Usaha Tertutup

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha tertutup yang dilarang sebagai kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Bidang Usaha Tertutup**

No	Bidang	Bidang Usaha
1	Pertanian	Budidaya Ganja
2	Kehutanan	Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES)
		Pemanfaatan (Pengambilan koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (Recent death coral) dari alam)
3	Perindustrian	Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung malti)
		Industri pembuatan chlor alkali dengan proses merkuri
		Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halon dan lainnya:</li> <li>2. penta Chlorophennol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, chlordane, Carbon Tetra Chlorida, Mathyl Chloroform, Methyl Bromide, chloro Flouro Carbon (CFC)</li> </ol>

No	Bidang	Bidang Usaha
		Industri bahan kimia schedule I konversi senjata kimia (sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, VX, Dll)
4	Perhubungan	Penyediaan dan penyelenggaraan terminal darat
		Penyelenggaraan dan pengoprasian jembatan timbang
		penyelenggaraan dan pengujian tipe kendaraan bermotor
		penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
		Telekomunikasi/Sarana bantu navigasi pelayaran
		Vessel Traffic Information System (VTIS)
		Jasa Pemanduan Lalu Lintas Udara
5	Komunikasi dan Informatika	Manajemen dan penyelenggaraan stasiun moniotoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
6	Kebudayaan dan parawisata	Museum pemerintah
		peningkatan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)
		Pemukiman/lingkungan adat
		monumen
		perjudian/kasino

Sumber : Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

### 2.1.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a Kepastian hukum;
- b Transparansi;
- c Akuntabilitas;
- d Kesetaraan;
- e Kebersamaan;
- f Efisiensi berkeadilan;
- g Berkelanjutan;
- h Berwawasan lingkungan;
- i Kemandirian; dan
- j Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sasaran Penanaman Modal meliputi:

- a Sektor Pariwisata dan Kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- b Sektor Pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- c Sektor Pertanian, diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian;
- d Sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- e Sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- f Sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
- g Sektor energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit Listrik menggunakan energy baru dan terbarukan;
- h Sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengembangan semua produk turunan;
- i Sektor kehutanan, diprioritaskan pada industry pengolahan hasil hutan;
- j Sektor bahan galian dan mineral, yaitu pada pengembangan hilirisasi produk batubara dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;
- k Sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- l Sektor lingkungan hidup. Dan
- m Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Penanaman Modal

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

Bentuk Percepatan Penanaman Modal

- (1) Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal daerah diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.

(2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

(3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

Mekanisme Percepatan Penanaman Modal meliputi :

#### **Keterbukaan Informasi**

(1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon penanam modal.

(2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

#### **Penjajagan Penanaman Modal**

(1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di daerah yang dilandasi oleh itikad baik.

(2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

#### **Pelaksanaan Penanaman Modal**

(1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut:

- a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur yang memuat rencana baku perusahaan.

- b. Gubernur dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat penilaian kelayakan dari Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, kecil dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

### **2.1.2.1 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal, penanam modal yang berhak mendapatkan insentif dan kemudahan adalah:

1. Penanam modal baru dan yang sudah berproduksi; dan
2. Penanam modal lama yang akan melakukan perluasan usaha

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, jenis pemberian insentif ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah provinsi.
- b Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, , jenis pemberian insentif ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan; dan
- c Pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah ditujukan kepada pelaku usaha besar dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;

Kemudahan memberikan data dan informasi berupa pemberian kemudahan dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal seperti:

- ❖ Peta Potensi ekonomi daerah;
- ❖ Rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan
- ❖ Rencana Strategis dan Skala Prioritas Provinsi.

b. Penyediaan sarana dan prasarana;

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana berupa:

- ❖ Jaringan Listrik
- ❖ Jaringan jalan
- ❖ Transportasi
- ❖ Jaringan telekomunikasi; dan
- ❖ Jaringan air bersih.

c. Penyediaan lahan atau lokasi;

Pemberian kemudahan dalam bentuk lahan atau lokasi diarahkan pada: Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan Sesuai dengan peruntukannya.

d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli.

e. Percepatan pemberian perizinan.

Bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi online.

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang – kurangnya memenuhi salah satu kriteria :

- a Nilai investasi sampai dengan atau lebih dari Rp.100.000.000.000,00
- b Menyerap banyak tenaga kerja lokal, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
- c Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, menerapkan prinsip – prinsip keseimbangan

dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada Rencana tata ruang wilayah.

- d Melakukan alih teknologi
- e Merupakan industri pionir, kriteria ini berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan kriteria:
  - ❖ Keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
  - ❖ Memberikan nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
  - ❖ Memperkenalkan teknologi baru; dan
  - ❖ Memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
- f Melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi;
- g Kriteria sesuai dengan peruntukan, yaitu bagi penanam modal yang sesuai dengan:
  - ❖ Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - ❖ Pencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
  - ❖ Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- h Melakukan pembangunan Infrastruktur, yaitu bagi penanam modal yang membantu atau mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan Infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- i Berada di kawasan strategis cepat tumbuh (Kawasan Ekonomi khusus, kawasan industri, food/rice estate, kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau – pulau kecil terluar.

## **2.2 Potensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur**

Potensi ekonomi provinsi Kalimantan timur dapat dilihat menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, sektor basis dan unggulan di Provinsi Kalimantan Timur.



### **2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu dari tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuasi. Hal itu diakibatkan nilai PDRB dari sektor pertambangan dan jasa perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2015. Nilai PDRB yang paling besar di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan selanjutnya adalah industri pengolahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur**

NO	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah) 2012 – 2016					
	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	23.991.786,00	25.535.675,00	27.267.197,00	28.506.914,00	28.639.038,00
2	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	228.444.298,00	232.661.007,00	231.725.331,00	220.405.121,00	212.646.364,00
3	<b>Industri Pengolahan</b>	87.788.850,00	86.201.392,00	86.590.089,00	88.889.323,00	93.740.627,00
4	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	125.925,00	130.413,00	158.116,00	206.238,00	223.396,00
5	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</b>	166.122,00	176.527,00	184.558,00	189.292,00	201.725,00
6	<b>Konstruksi</b>	27.778.922,00	29.142.460,00	30.987.510,00	30.696.155,00	29.649.428,00
7	<b>Perdagangan Besar dan Eceran: Resparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	19.475.400,00	20.110.603,00	21.142.439,00	21.442.368,00	22.031.080,00
8	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	10.236.555,00	10.903.342,00	11.694.983,00	12.017.842,00	12.384.853,00
9	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	2.757.397,00	2.849.544,00	3.010.515,00	3.170.862,00	3.287.317,00
10	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	4.736.405,00	5.167.744,00	5.604.479,00	6.034.020,00	6.483.808,00
11	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	5.399.639,00	6.175.392,00	6.324.322,00	6.545.208,00	6.572.289,00
12	<b>Real Estate</b>	3.240.873,00	3.507.514,00	3.798.437,00	3.934.655,00	3.901.891,00
13	<b>Jasa Perusahaan</b>	763.480,00	826.267,00	894.765,00	861.219,00	824.638,00
14	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib</b>	6.829.762,00	7.153.498,00	7.818.058,00	8.146.366,00	7.897.940,00
15	<b>Jasa Pendidikan</b>	3.782.287,00	4.491.029,00	5.040.441,00	5.538.438,00	5.944.182,00
16	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	1.679.573,00	1.765.605,00	1.924.957,00	2.127.636,00	2.325.816,00
17	<b>Jasa Lainnya</b>	1.680.436,00	1.734.895,00	1.862.851,00	2.027.047,00	2.222.654,00
<b>Jumlah PDRB</b>		428.877.710,00	<b>438.532.907,00</b>	<b>446.029.048,00</b>	<b>440.738.704,00</b>	<b>438.977.046,00</b>

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017

## 2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2016

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi yaitu dari tahun 2012 – 2014 konsisten dengan laju pertumbuhan berada pada nilai 0,02, tetapi pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi sampai -0,01. Hal itu diakibatkan nilai PDRB dari sektor pertambangan dan jasa perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2015. Laju pertumbuhan sektor yang terus mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa lainnya. Adapun untuk sektor yang lainnya semuanya mengalami fluktuasi selama kurun waktu tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5

**Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur**

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2016				
	Lapangan Usaha	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	0,07	0,05	0,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,00	-0,05	-0,04
3	Industri Pengolahan	-0,02	0,00	0,03	0,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,21	0,30	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,03	0,07
6	Konstruksi	0,05	0,06	-0,01	-0,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,03	0,05	0,01	0,03
8	Transportasi dan Pergudangan	0,07	0,07	0,03	0,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,06	0,05	0,04
10	Informasi dan Komunikasi	0,09	0,08	0,08	0,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	0,02	0,03	0,00
12	Real Estate	0,08	0,08	0,04	-0,01
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	-0,04	-0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,05	0,09	0,04	-0,03
15	Jasa Pendidikan	0,19	0,12	0,10	0,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,05	0,09	0,11	0,09
17	Jasa Lainnya	0,03	0,07	0,09	0,10
<b>Jumlah PDRB</b>		0,02	0,02	-0,01	0,00

Sumber : Hasil Analisis, 2018

### 2.2.3 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun di dominasi oleh sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan yang mencapai  $\pm 50\%$  dan  $\pm 20\%$ . Artinya corak atau karakteristik ekonomi di Provinsi Kalimantan adalah daerah pertambangan dan daerah industri pengolahan. Kontribusi sektor yang paling kecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, dan sektor pengadaan Listrik dan gas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2. 6 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur**

NO	Struktur Perekonomian Provinsi Kaltim Tahun 2012 - 2016					
	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,59	5,82	6,11	6,47	6,52
2	Pertambangan dan Penggalian	53,27	53,05	51,95	50,01	48,44
3	Industri Pengolahan	20,47	19,66	19,41	20,17	21,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
6	Konstruksi	6,48	6,65	6,95	6,96	6,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,54	4,59	4,74	4,87	5,02
8	Transportasi dan Pergudangan	2,39	2,49	2,62	2,73	2,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64	0,65	0,67	0,72	0,75
10	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,18	1,26	1,37	1,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,41	1,42	1,49	1,50
12	Real Estate	0,76	0,80	0,85	0,89	0,89
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,19	0,20	0,20	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,59	1,63	1,75	1,85	1,80
15	Jasa Pendidikan	0,88	1,02	1,13	1,26	1,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,40	0,43	0,48	0,53
17	Jasa Lainnya	0,39	0,40	0,42	0,46	0,51
<b>Jumlah PDRB</b>		100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2018

## 2.2.4 Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Timur

Sektor Unggulan atau sektor yang berpotensi memiliki nilai potensi ekspor di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu dari tahun 2012 – 2016 adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan dengan indikator nilai  $LQ > 1$ , Artinya sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan merupakan sektor basis di provinsi Kalimantan terhadap provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Selain sektor basis juga terdapat sektor yang seimbang hanya mampu mencukupi untuk skala provinsi namun diprediksi pada 20 tahun yang akan datang akan mampu menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor konstruksi dengan nilai  $LQ 0,84$ . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2. 7 Nilai Location Quotient (LQ) Provinsi Kalimantan Timur**

NO	Nilai Location Quotient (LQ) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2016					
	Lapangan Usaha	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,59	0,50	0,52	0,54	0,53
2	Pertambangan dan Penggalian	1,20	1,36	1,38	1,40	1,41
3	Industri Pengolahan	1,14	1,14	1,13	1,16	1,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,65	0,66	0,71	0,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,41	0,39	0,39	0,40	0,41
6	Konstruksi	0,91	0,87	0,87	0,86	0,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,75	0,62	0,63	0,63	0,63
8	Transportasi dan Pergudangan	0,70	0,69	0,71	0,70	0,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	0,57	0,57	0,59	0,59
10	Informasi dan Komunikasi	0,74	0,63	0,63	0,64	0,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	0,68	0,67	0,69	0,67
12	Real Estate	0,69	0,57	0,59	0,60	0,59
13	Jasa Perusahaan	0,79	0,71	0,73	0,70	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,57	0,53	0,55	0,54	0,53
15	Jasa Pendidikan	0,50	0,46	0,48	0,51	0,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	0,47	0,49	0,51	0,53
17	Jasa Lainnya	0,71	0,64	0,65	0,67	0,70

Sumber : Hasil Analisis, 2018

## **2.3 Potensi Investasi Provinsi Kalimantan Timur**

### **2.3.1 Perkembangan Investasi Provovinsi Kalimantan Timur**

Perkembangan nilai investasi berdasarkan PMDN di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu dari tahun 2012 – 2016 mengalami keniakan nilai investasi, nilai investasi sektor yang paling besar di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor sekunder dengan 3.544 proyek dengan nilai investasi mencapai 106.858,9 Milyar dengan sektor industri makanan yang paling besar, adapun nilai investasi sektor yang mempunyai nilai investasi yang paling kecil adalah sektor primer hanya 802 proyek dengan nilai investasi hanya mencapai 27.704,7 milyar dengan sektor perikanan yang paling kecil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Perkembangan nilai investasi berdasarkan PMDA di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu dari tahun 2012 – 2016 mengalami keniakan nilai investasi, nilai investasi sektor yang paling besar di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor sekunder 9.564 proyek dengan nilai investasi mencapai 16.687,6 milyar, kontribusi industri makanan yang paling besar, adapun nilai investasi sektor yang mempunyai nilai investasi yang paling kecil adalah sektor primer yaitu 2.313 proyek dengan nilai investasi mencapai 4.502 milyar dimana sektor perikanan merupakan sektor dengan investasi yang paling kecil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel Tabel 2. 8 Perkembangan Realisasi Investasi Pmdn Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor Tahun 2016**

No	SEKTOR	2012		2013		2014		2015		2016	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER / Primary Sector</b>	<b>266</b>	<b>20.369,1</b>	<b>444</b>	<b>25.715,5</b>	<b>313</b>	<b>16.520,6</b>	<b>598</b>	<b>17.059,7</b>	<b>802</b>	<b>27.704,7</b>
1	Tanaman Pangan & Perkebunan / <i>Food Crops &amp; Plantation</i>	180	9.631,5	278	6.589	200	12.707,3	372	12.040,9	543	20.998,6
2	Peternakan / <i>Livestock</i>	31	97,4	48	361	43	650,7	69	325,4	90	466,0
3	Kehutanan / <i>Forestry</i>	9	144,5	11	0	9	0,3	15	471,8	16	203,8
4	Perikanan / <i>Fishery</i>	7	14,7	19	4	11	21,7	18	274,6	19	2,6
5	Pertambangan / <i>Mining</i>	39	10.480,9	88	18.762	50	3.140,7	124	3.946,8	134	6.033,6
<b>II</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER / Secondary Sector</b>	<b>714</b>	<b>49.888,9</b>	<b>1.225</b>	<b>51.171,1</b>	<b>942</b>	<b>59.034,7</b>	<b>2.525</b>	<b>89.045,3</b>	<b>3.544</b>	<b>106.858,9</b>
6	Industri Makanan / <i>Food Industry</i>	222	11.166,7	434	15.081	320	19.596,4	879	24.534,0	1.171	32.046,3
7	Industri Tekstil / <i>Textile Industry</i>	51	4.450,9	101	2.446	72	1.451,5	185	2.724,5	284	3.209,8
8	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki / <i>Leather Goods &amp; Footwear Industry</i>	9	76,7	10	80	10	103,1	13	5,4	21	69,1
9	Industri Kayu / <i>Wood Industry</i>	15	57,0	18	391	21	585,1	70	1.185,3	116	3.151,0
10	Ind. Kertas dan Percetakan / <i>Paper and Printing Industry</i>	64	7.561,0	112	6.849	57	4.093,7	127	6.529,5	185	5.257,9
11	Ind. Kimia dan Farmasi / <i>Chemical and Pharmaceutical Industry</i>	94	5.069,5	153	8.886	105	13.313,6	320	20.712,5	452	30.111,9
12	Ind. Karet dan Plastik / <i>Rubber and Plastic Industry</i>	110	2.855,0	145	2.905	132	2.117,5	284	3.695,9	422	3.576,9
13	Ind. Mineral Non Logam / <i>Non Metallic Mineral Industry</i>	37	10.730,7	66	4.625	57	11.923,1	181	20.501,7	217	15.404,6
14	Ind. Logam, Mesin & Elektronik / <i>Metal, Machinery &amp; Electronic Industry</i>	81	7.225,7	131	7.568	123	5.292,6	326	7.938,4	483	11.568,5
15	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam / <i>Medical Preci. &amp; Optical Instru, Watches &amp; Clock Industry</i>	-	-	12	210	1	-	4	-	7	5,0
16	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain / <i>Motor Vehicles &amp; Other Transport Equip. Industry</i>	21	664,4	31	2.069	28	490,1	93	1.070,8	93	1.713,9
17	Industri Lainnya / <i>Other Industry</i>	10	31,5	12	62	16	68,1	43	147,4	93	744,2
<b>III</b>	<b>SEKTOR TERSIER / Tertiary Sector</b>	<b>230</b>	<b>21.924,0</b>	<b>460</b>	<b>51.263,9</b>	<b>397</b>	<b>80.570,8</b>	<b>1.977</b>	<b>73.360,9</b>	<b>3.168</b>	<b>81.742,5</b>
18	Listrik, Gas dan Air / <i>Electricity, Gas &amp; Water Supply</i>	42	3.796,8	85	25.831	68	36.296,8	247	21.946,8	472	22.794,5
19	Konstruksi / <i>Construction</i>	17	4.586,6	33	6.033	27	12.097,6	178	17.165,4	365	14.039,1
20	Perdagangan & Reparasi / <i>Trade &amp; Repair</i>	35	1.030,4	87	2.205	99	518,5	663	1.426,6	1.024	4.513,4
21	Hotel & Restoran / <i>Hotel &amp; Restaurant</i>	34	1.015,0	66	1.402	43	1.730,8	257	3.977,3	368	1.559,9
22	Transportasi, Gudang & Komunikasi / <i>Transport, Storage &amp; Communication</i>	33	8.612,0	91	13.178	46	15.715,0	213	21.333,9	364	26.769,6

No	SEKTOR	2012		2013		2014		2015		2016	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
23	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/ <i>Real Estate, Ind. Estate &amp; Business Activities</i>	6	58,0	26	2.152	45	13.111,8	212	6.509,9	324	9.192,8
24	Jasa Lainnya / <i>Other Services</i>	63	2.825,1	72	462	69	1.100,4	207	1.000,9	251	2.873,2
<b>JUMLAH / Total</b>		<b>1.210</b>	<b>92.182,0</b>	<b>2.129</b>	<b>128.150,6</b>	<b>1.652</b>	<b>156.126,2</b>	<b>5.100</b>	<b>179.465,9</b>	<b>7.514</b>	<b>216.306,1</b>

Sumber : Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2017



**Tabel 2. 9 Perkembangan Realisasi Investasi Pma Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor 2016**

No	SEKTOR	2012		2013		2014		2015		2016	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER / Primary Sector</b>	<b>734</b>	<b>5.933,1</b>	<b>1.467</b>	<b>6.471,8</b>	<b>977</b>	<b>6.991,3</b>	<b>1.934</b>	<b>6.236,4</b>	<b>2.313</b>	<b>4.502</b>
1	Tanaman Pangan & Perkebunan / <i>Food Crops &amp; Plantation</i>	261	1.601,9	520	1.605,3	324	2.206,7	606	2.072,0	800	1.589,1
2	Peternakan / <i>Livestock</i>	14	19,8	19	11,3	26	30,8	98	75,1	150	48,9
3	Kehutanan / <i>Forestry</i>	16	26,9	39	28,8	28	53,3	79	19,0	108	78,2
4	Perikanan / <i>Fishery</i>	31	29,0	69	10,0	47	35,3	85	53,1	125	43,3
5	Pertambangan / <i>Mining</i>	412	4.255,4	820	4.816,4	552	4.665,1	1.066	4.017,2	1.130	2.742,4
<b>II</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER / Secondary Sector</b>	<b>1.714</b>	<b>11.770,0</b>	<b>3.322</b>	<b>15.858,8</b>	<b>3.075</b>	<b>13.019,3</b>	<b>7.184</b>	<b>11.763,1</b>	<b>9.564</b>	<b>16.687,6</b>
6	Industri Makanan / <i>Food Industry</i>	347	1.782,9	797	2.117,7	640	3.139,6	1.306	1.521,2	1.948	2.115,0
7	Industri Tekstil / <i>Textile Industry</i>	149	473,1	241	750,7	285	422,5	670	433,4	886	321,3
8	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki / <i>Leather Goods &amp; Footwear Industry</i>	73	158,9	91	96,2	102	210,7	243	161,6	279	144,4
9	Industri Kayu / <i>Wood Industry</i>	38	76,3	59	39,5	61	63,7	118	47,1	240	267,5
10	Ind. Kertas dan Percetakan / <i>Paper and Printing Industry</i>	57	1.306,6	103	1.168,9	87	706,5	210	706,9	274	2.786,6
11	Ind. Kimia dan Farmasi / <i>Chemical and Pharmaceutical Industry</i>	230	2.769,8	430	3.142,3	377	2.323,4	856	1.955,7	1.096	2.889,1
12	Ind. Karet dan Plastik / <i>Rubber and Plastic Industry</i>	147	660,3	231	472,2	255	543,9	567	694,5	710	737,3
13	Ind. Mineral Non Logam / <i>Non Metallic Mineral Industry</i>	48	145,8	138	874,1	104	916,9	277	1.302,8	397	1.076,0
14	Ind. Logam, Mesin & Elektronik / <i>Metal, Machinery &amp; Electronic Industry</i>	364	2.452,6	679	3.327,1	690	2.471,9	1.781	3.092,5	2.185	3.897,1
15	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam / <i>Medical Preci. &amp; Optical Instru, Watches &amp; Clock Industry</i>	4	3,4	12	26,1	11	7,2	13	6,9	22	8,8
16	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain / <i>Motor Vehicles &amp; Other Transport Equip. Industry</i>	163	1.840,0	342	3.732,2	295	2.061,3	758	1.757,3	928	2.369,3
17	Industri Lainnya / <i>Other Industry</i>	94	100,2	199	111,7	168	151,8	385	83,2	599	75,2
<b>III</b>	<b>SEKTOR TERSIER / Tertiary Sector</b>	<b>2.131</b>	<b>6.861,7</b>	<b>4.823</b>	<b>6.286,9</b>	<b>4.833</b>	<b>8.519,2</b>	<b>8.620</b>	<b>11.276,5</b>	<b>13.451</b>	<b>7.774,6</b>
18	Listrik, Gas dan Air / <i>Electricity, Gas &amp; Water Supply</i>	65	1.514,6	156	2.221,8	118	1.248,8	350	3.028,9	748	2.139,6
19	Konstruksi / <i>Construction</i>	77	239,6	146	526,8	147	1.383,6	358	954,5	437	186,9
20	Perdagangan & Reparasi / <i>Trade &amp; Repair</i>	983	483,6	2.233	606,5	2.339	866,8	3.705	625,1	5.541	670,4
21	Hotel & Restoran / <i>Hotel &amp; Restaurant</i>	223	768,2	448	462,5	407	513,1	1.052	650,2	2.028	887,8
22	Transportasi, Gudang & Komunikasi / <i>Transport, Storage &amp; Communication</i>	93	2.808,2	198	1.449,9	228	3.000,9	493	3.289,9	620	750,2
23	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran / <i>Real Estate, Ind. Estate &amp; Business Activities</i>	131	401,8	285	677,7	255	1.168,4	858	2.433,6	1.151	2.321,5
24	Jasa Lainnya / <i>Other Services</i>	559	645,8	1.357	341,7	1.339	337,5	1.804	294,3	2.926	818,2
	<b>JUMLAH / Total</b>	<b>4.579</b>	<b>24.564,7</b>	<b>9.612</b>	<b>28.617,5</b>	<b>8.885</b>	<b>28.529,7</b>	<b>17.738</b>	<b>29.275,9</b>	<b>25.328</b>	<b>28.964,1</b>

Sumber : Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2017

### 2.3.2 Peluang Investasi Povinsi Kalimantan timur

Peluang investasi di Provinsi Kalimantan Timur dilihat melalui pendekatan ICOR, yaitu pendekatan untuk melihat nilai investasi yang digunakan efisien atau tidak, menurut Widodo (1990) menyatakan bahwa secara umum, nilai ICOR yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik antara 3 – 4, semakin tinggi ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Berdasarkan nilai ICOR di Provinsi Kalimantan investasi sektor yang efisien baik adalah sektor industri pengolahan dengan nilai ICOR 3,42. Untuk investasi sektor yang efisien adalah sektor kontruksi, sektor pertambangan dan sektor administrasi karena nilai ICOR kurang dari 4, sedangkan sektor – sektor lainnya mempunyai nilai ICOR lebih dari 4 sehingga mempunyai nilai investasi yang tidak efisien. Berdasarkan nilai ICOR dapat disimpulkan peluang investasi yang efisien di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor industri pengolahan dan sektor kontruksi, pertambangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 10 Nilai ICOR Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016**

No	Sektor	Nilai PDRB Tahun 2015 - 2016 ( $\Delta Y$ )	Nilai Investasi Tahun 2015 - 2016 ( $\Delta X$ )	ICOR
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	132.124,00	8.558.195,00	64,77
2	Pertambangan dan Penggalian	-7.758.757,00	2.086.791,40	-0,27
3	Industri Pengolahan	4.851.304,00	16.573.798,70	3,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29.591,00	847.680,20	28,65
5	Kontruksi	-1.046.727,00	-3.126.325,20	2,99
6	Perdagangan Besar dan Eceran: Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	588.712,00	3.086.772,20	5,24
7	Transportasi dan Pergudangan	816.799,00	5.435.695,90	6,65
8	Real Estate	-69.345,00	-2.417.375,80	34,86
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	-248.426,00	2.682.845,30	-10,80
10	Jasa Lainnya	195.607,00	1.872.305,60	9,57

Sumber : Hasil Analisis, 2018



# BAB 3

## PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan Kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, seras iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

### 3.1 Pengaruh Kebijakan Insentif

Studi yang dilakukan oleh Sitompul (2007); Rustiono (2008); Luntungan (2008); dan Sodik (2005) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terutama didorong oleh investasi yang berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi,

pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (*knowledge*) dari negara maju ke negara berkembang.

Pemberian Bentuk Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di setiap kota masih minim, karena hanya memberikan dua kriteria yaitu, berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap, hal ini mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya di suatu kota, sehingga tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan yang untuk meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu kota belum tercapai secara maksimal.

Investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia pada dasarnya diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.

Tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif sebagai berikut:

- 1 Mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan penanaman modal.
- 2 Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Perekonomian pasti tumbuh kalau sektor-sektor dibawahnya bekerja dengan baik, termasuk sisi sektor produksi, yaitu industri. berarti harus ada sector-sektor yang dipacu. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal diatur dalam Undang Undang Penanaman Modal bahwa pemberian fasilitas hanya dapat diberikan kepada:
  - ❖ Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; atau
  - ❖ Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru.

Bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan dalam rangka penanaman modal asing maupun domestik terdapat 2 bagian besar yaitu fasilitas perpajakan dan fasilitas perizinan, adapun fasilitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

## **1. Fasilitas Perpajakan**

Kebijaksanaan pemerintah yang memberikan insentif perpajakan dapat menjadi salah satu insentif langsung yang harus terus diwujudkan dalam rangka untuk dapat lebih menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan keseimbangan sehingga tidak sampai mengurangi penerimaan negara yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang yang lain. Disamping itu, harus dikoordinasikan dengan instansi-instansi yang terkait, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan undang-undang dan tidak malah menghambat kegiatan usaha penanaman modal.

Bentuk insentif penanaman modal adalah:

- a) Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan, netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu
- b) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri;
- c) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e) Penyusutan dan amortisasi<sup>19</sup> yang di percepat;
- f) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

## **2. Fasilitas Perizinan**

Selain fasilitas perpajakan pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a) Hak atas Tanah dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
- b) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (Sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

- c) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh tahun) dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- d) Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

### **3. Pelayanan Keimigrasian**

Masalah keimigrasian sering dirasakan oleh pengusaha asing sebagai hambatan terutama ketika administrasi tempat tinggal hampir berakhir, Investor sering direpotkan dalam proses pengurusannya. Untuk itu pemerintah mengatur mengenai kemudahan pelayan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan atas rekomendasi dari BKPM untuk:

- a) Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
- b) Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan 3) calon penanam modal yang akan melakukan penajakan penanaman modal.

### **4. Perizinan Impor**

Penanaman modal mengatur mengenai kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor hanya dapat diberikan terhadap:

- a) Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b) Barang yang tidak memberikan dampak negative terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c) Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d) Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

### **3.2 Pengaruh Kebijakan Kemudahan Investasi**

Negara membutuhkan modal untuk membiayai proyek pembangunannya. Apabila ternyata persediaan tabungan di dalam negeri tidak tercukupi, maka salah satu cara untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan menarik investasi asing langsung (*Investment /FDI*). Kebijakan nasional merupakan kunci daya tarik investasi asing langsung. Dalam beberapa dekade terakhir banyak negara mulai melakukan liberalisasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi asing langsung. Dalam hal tertentu, investasi asing langsung hanyalah pelengkap

investasi domestik. Namun, dalam perkembangannya investasi asing langsung memiliki peranan penting dalam investasi secara keseluruhan.

Pertumbuhan investasi asing di Indonesia sejak tahun sampai dengan tahun 2010 terlihat adanya *trend* peningkatan arus investasi asing yang disetujui. Kondisi ini tidak terlepas dari sejumlah insentif peraturan pemerintah yang diberikan untuk menarik investor ke Indonesia seperti paket kebijakan insentif fiskal dan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung peningkatan investasi permanen (Depkeu, 2011).

Nilai ekonomi suatu investasi selain dilihat dari penambahan output, juga harus dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, karena program investasi bukan hanya dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran . Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat dampak Investasi pada penyerapan tenaga kerja antara lain Greenaway, Morgan dan Wright (2002) yang menunjukkan adanya dampak positif investasi asing di negara berkembang, antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, investasi langsung dari modal asing membuka lapangan kerja baru bagi para penganggur di negara-negara berkembang.

Penelitian lain dari Ramsletter (2004), selama tahun 1996 hingga 2000, menunjukkan adanya pola ketertarikan para pencari kerja yang berpendidikan tinggi di Thailand untuk bekerja di perusahaan asing, karena standar upah yang lebih tinggi. Hasil penelitian yang menarik di Provinsi Kalimantan Timur, penelitian Akhmad syaihu pada tahun 2012 bahwa Investasi swasta dan pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai masing – masing sebesar 26% dan 65,10%. Sedangkan Investasi swasta dan pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai masing – masing sebesar 91.10% dan 1,80%.

### **3.3 Kendala Implementasi Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi**

Indonesia belum menjadi prioritas sebagai tempat untuk menginvestasikan modal para investor luar negeri. Kajian yang sudah dilakukan oleh UNCTAD pada tahun 2006 menempatkan Indonesia sebagai daerah yang kurang diminati karena nilai *location intensity* kurang dari 5. Selain itu kinerja dan potensi arus masuk investor

asing juga masuk dalam kategori rendah. Banyaknya hambatan masuk bagi investor asing, birokrasi yang kurang efisien dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi beberapa alasan mengapa Indonesia kurang diminati oleh investor asing. Oleh karena itu penurunan PMA di Indonesia perlu dicermati sebagai peringatan (*warning*) bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan sektor ini guna mendorong peningkatan perekonomian yang lebih baik. Bagaimanapun juga kebijakan investasi akan terkait langsung dengan kebijakan industri, perdagangan, dan juga kebijakan non ekonomi lainnya.

Persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara di dunia untuk menarik FDI mendorong setiap negara termasuk Indonesia untuk lebih meningkatkan iklim investasi melalui *policy framework* yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan investor. Hal ini harus didukung oleh *economic determinant* dan *non economic determinant* yang lebih kondusif. Harus dipahami bahwa sesungguhnya investor asing (*fund manager*) sudah memahami kondisi dan karakteristik suatu negara, sehingga kebijakan apapun yang digulirkan oleh satu negara akan terpantau oleh investor. Saat ini yang terjadi adalah penolakan oleh investor yang semakin tinggi yang disebabkan oleh banyak factor, baik ekonomi maupun non ekonomi.

### **3.3.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Investasi**

Menurut Harjono (2013), faktor yang mempengaruhi investasi dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu faktor di dalam negeri (Internal) dan di luar negeri (Eksternal).

#### **a) Faktor Internal**

Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- 1) Stabilitas politik dan perekonomian;
- 2) Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka penggairahan iklim investasi, dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi lebih terbuka. Pembangunan kawasan industri, prasarana seperti jalan, telepon serta listrik yang saat ini dapat ditangani oleh swasta, diperkirakan akan lebih siap untuk dapat menunjang pelaksanaan investasi;
- 3) Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian Timur yang akan semakin merangsang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang;



- 4) Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan, dan keindahan alam tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, industri perkayuan, industri kertas dan industri perhotelan (*tourism*), yang sekarang menjadi sektor primadona yang banyak diminati para investor baik dalam rangka PMDN maupun PMA; dan
- 5) Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu dan mainan anak-anak.

#### **b) Faktor Eksternal**

Faktor Eksternal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- 1) Apresiasi mata uang dari Negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang rupiah, dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung. Hal tersebut dikarenakan melakukan investasi menjadi sangat murah, karena nilai uang rupiah menjadi sangat kecil dari nilai mata uang negara asal investor.
- 2) Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan meningkatnya biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar, maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama di Negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekati produk dengan pasar, sehingga bagi perusahaan yang padat karya, dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

Berdasarkan kepada hubungan sesuatu industri dengan pasarnya, berbagai industri dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu industri yang mendekati ke bahan mentah (*resource oriented industry*), industri yang mendekati ke pasarnya (*market oriented industry*), dan industri yang letaknya netral terhadap pasar maupun bahan mentah (*foot-loose industry*). Bagi industri yang termasuk dalam golongan pertama yang terutama terdiri dari industri yang memproses bahan pertanian dan hasil industri primer lainnya, menarik tidaknya sesuatu

daerah terutama ditentukan apakah di daerah tersebut terdapat bahan mentah yang diperlukannya. Tersedianya bahan mentah dengan harga yang murah telah memberikan dorongan yang besar sekali kepada industri yang bersangkutan untuk mengembangkan usahanya, dan dengan demikian mengurangi perangsang fiskal dan keuangan.

Industri golongan kedua, yang pada umumnya merupakan industri bahan makanan yang tidak tahan lama atau industri jasa-jasa, menarik tidaknya sesuatu daerah terutama tergantung pada apakah daerah tersebut tersedia pasar yang cukup bagi kegiatan industri tersebut, dengan demikian maka perangsang fiskal dan keuangan yang akan diberikan dapat dikurangi. Industri golongan ketiga, yang pada umumnya terdiri dari industri pengolahan (manufakturing) menghadapi persoalan yang sedikit berbeda yaitu efisiensinya tidak tergantung pada tersedianya pasar atau bahan mentah di daerah tersebut. Dalam keadaan demikian industri tersebut mempunyai lebih banyak kebebasan dalam menentukan lokasi dari industrinya dan perangsang yang disediakan mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap keputusan mereka untuk menentukan lokasi dari industrinya.

Faktor-faktor penting lainnya yang akan menentukan menarik tidaknya suatu daerah sebagai lokasi industri adalah *external economies* selain dari prasarana umum seperti fasilitas untuk memperoleh kredit jangka pendek, tersedianya tenaga ahli yang diperlukan, tersedianya perusahaan *service* atau jasa untuk industri tersebut, tersedianya perumahan bagi para pekerja, dan tersedianya fasilitas rekreasi dan pendidikan untuk para pekerja. Tanpa tersedianya perusahaan jasa, perumahan pekerja, tempat rekreasi dan institusi pendidikan yang memadai, industri-industri terpaksa menyediakan fasilitas tersebut dan mempertinggi jumlah investasi yang perlu mereka keluarkan. Sedangkan kesukaran dalam mendapatkan kredit jangka pendek untuk membiayai pengeluaran rutin terutama akan mengganggu kelancaran jalannya perusahaan. Dan akhirnya ketiadaan tenaga kerja ahli yang mahir menyebabkan industri-industri harus mencari daerah lain dan hal ini akan mempertinggi biaya. Jadi apabila berbagai jenis *external economies* tersebut di atas tidak cukup tersedia pemerintah perlu memperbesar perangsang fiskal dan keuangan yang diberikan untuk mengimbangi kekurangan dari berbagai fasilitas di atas.

### **3.3.2 Kendala Implementasi Kebijakan Investasi**

Kondisi riil yang sekarang terjadi, pada tiap daerah, bahkan negara mengalami tantangan dalam pengembangan penanaman modal. Tantangan yang bersifat eksternal yang paling nyata ada meningkatnya persaingan antardaerah maupun negara dalam menarik investor. Sementara itu, secara internal ada banyak kelemahan dan tantangan seperti: ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan penanaman modal; ketersediaan energy; perangkat peraturan pusat dan daerah; perijinan penanaman modal baik di pusat dan daerah; penyebaran penanaman modal yang belum merata; dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi.

Faktor penghambat dalam perkembangan penanaman modal di Indonesia antara lain:

- 1) Belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kab/Kota menjadi kendala bagi para investor untuk berinvestasi.
- 2) Para investor membutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan izin lokasi yang berpedoman pada RTRW tersebut.
- 3) Pihak investor kurang memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar perusahaan sehingga pada saat terjadi sengketa lahan terkait sertifikat hak guna usaha yang dimiliki investor, masyarakat sulit untuk diajak negoisasi.
- 4) Pihak masyarakat kurang menerima kehadiran investor dan pada saat pengurusan hak guna usaha dalam pelepasan lahan, masyarakat sulit diajak negoisasi untuk menentukan jumlah ganti rugi lahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Vita Anggriani tahun 2013 tentang Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang.

- 1) Terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dengan beberapa pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum;
- 2) Sumber daya manusia di Kota Bontang masih sangat kurang;
- 3) Sarana dan prasarana yang belum lengkap;
- 4) Belum efektifnya mengenai waktu dalam penerbitan izin karena masih lama dari waktu yang ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle tahun 2014 tentang Efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penyerapan Investasi di Kalimantan Timur. menunjukkan bahwa efektifitas PTSP dalam penyerapan investasi di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pencapaian tujuan dapat meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi sarana dan prasarana serta sumberdaya alam, integrasi yang dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan publik maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adaptasi lebih ditekankan pada prosedur perizinan yang lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, sehingga diperlukan kemampuan dan keahlian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tersebut agar dilakukan secara profesional.

Secara umum keinginan dari investor terhadap situasi di daerah antara lain adalah (Fauzan, 2006): iklim investasi yang kondusif berupa Kepastian hukum/berusaha; Stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan; Kemudahan pelayanan (perizinan, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan); Insentif (fiskal & nonfiskal) yang kompetitif; Infrastruktur yang memadai; dan Kondisi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 PP 45/2008 bahwa tiap pmda memiliki keleluasaan dalam hal menarik investor dan upaya peningkatan penanaman modal melalui pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, seperti: (1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; (3) Pemberian dana stimulan; (4) Pemberian bantuan modal.

**Tabel 3. 1 Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Insentif**

Aspek	Resiko Fiskal	Resiko Teknis	Daya terima publik/investor	Keterangan
pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah	Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima namun bukan kebutuhan pokok	Pada investasi sektor basis/strategis (share & penyerapan TK)
pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah	Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima namun bukan kebutuhan pokok	Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)
pemberian dana stimulant	Peningkatan pengeluaran/ realokasi anggaran belanja	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima	Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)
pemberian bantuan modal	Peningkatan pengeluaran/ realokasi anggaran belanja	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima	Realisasi Lembaga Penjaminan Daerah; Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)

Selain itu, upaya peningkatan penanaman modal di daerah juga dapat dilakukan dengan kebijakan pemberian kemudahan terkait dengan penanaman modal yang bentuknya dapat berupa: (1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; (2) Penyediaan sarana dan prasarana; (3) Penyediaan lahan atau lokasi; (4) Pemberian bantuan teknis; (5) Percepatan pemberian perizinan.

**Tabel 3. 2 Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Kemudahan Investasi**

Aspek	Resiko Fiskal	Resiko Teknis	Daya terima publik/investor	Keterangan
Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal	Minim, bagian kegiatan unit teknis	Kontinu update data, upgrade teknologi informasi,	Diterima, khususnya investor baru	Data benar/riil terkonfirmasi
Penyediaan sarana dan prasarana	Alokasi anggaran: Prioritas pengadaan sarana yang mendukung investasi	Assesment riil kebutuhan sarana yang mendorong investasi	Diterima	
Penyediaan lahan atau lokasi	Potensi perubahan pendapatan	Valuasi nilai <i>best use</i> aset;	Diterima	Optimalisasi aset daerah
Pemberian bantuan teknis	Alokasi anggaran: kegiatan bantuan teknis	Staf khusus fasilitasi investasi	Diterima	
Percepatan pemberian perizinan	Anggaran rutin	Support Gerai Investasi; Regulasi baru	Diterima	

### 3.3.3 Daya Tarik Investasi menurut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD ) menaruh fokus pemantauannya pada segala hal terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi dan kebijakan desentralisasi/ otonomi daerah secara umum. Dengan menggunakan pendekatan multi-perspektif (ekonomi, politik, hukum dan administrasi publik), KPPOD melakukan studi, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola ekonomi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah. KPPOD melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan kebijakan dan pelayanan publik. Begitupun penelitian mengenai Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia. KPPOD menetapkan lima indikator yang menjadi daya tarik investasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan, yang mencakup kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah, serta kepemimpinan lokal.
- 2) Keamana, Politik, dan Sosial Budaya

- 3) Ekonomi Daerah, yang mencakup potensi ekonomi, dan struktur ekonomi
- 4) Tenaga Kerja, yang mencakup ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja.
- 5) Infrastruktur Fisik, yang mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik tersebut.

Menurut pengamat pemerintahan dari Universitas Indonesia Prof. Eko Prasajo paling tidak terdapat 3 (tiga) masalah utama, yaitu :

1. Masalah kelembagaan pemerintah daerah, terkait dengan kualitas birokrasi yang belum efisien, belum efektif, belum profesional, dan korup. Hal ini disebabkan paradigma kekuasaan yang masih kuat bukan paradigma pelayanan.
2. Masalah politik, yaitu menguatnya tensi politik dalam birokrasi sehingga birokrasi dijadikan mesin politik sehingga kinerja investasi masih kurang.
3. Masalah infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi sebagai kebutuhan dasar dan prasyarat dalam investasi.

### **3.4 Analisis SWOT Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi**

Identifikasi dan analisis kondisi internal dilakukan melalui pendekatan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT), dengan melibatkan pemikiran sistematis dan hasil diagnosa menyeluruh dari faktor yang berhubungan kebijakan insentif dan kemudahan perijinan dalam penanaman modal di Kalimantan Timur. Semua faktor digunakan secara ekstensif di dalam perencanaan strategis, di mana semua pengaruh faktor lingkungan operasional dianalisis secara mendalam dan luas.

Analisis SWOT adalah satu alat dukung yang penting untuk pengambilan keputusan, digunakan untuk meneliti satu lingkungan internal dan eksternal secara sistematis. Analisa SWOT dipergunakan untuk meringkas faktor internal dan eksternal paling penting yang dapat mempengaruhi masa depan investasi yang biasanya dikenal sebagai faktor-faktor strategis.

#### **3.4.1 Identifikasi Faktor Internal**

Faktor Internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strengths*), dan Kelemahan (*Weaknesses*).

### **1) Faktor Kekuatan (*Strengths*)**

Merupakan potensi yang sangat unit/potensial di Provinsi Kalimantan Berdasarkan faktor ekonomi, dan kebijakan yang berkaitan dengan insentif dan kemudahan perijinan penanaman modal. Faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sektor Pertambangan menjadi sektor basis;
- b) Sektor industri pengolahan menjadi sektor basis;
- c) Investasi sektor industri pengolahan dan sektor kontruksi efisien dalam investasi sektor pada tahun 2016;
- d) Sektor kontruksi pada 5 tahun mendatang akan mampu menjadi sektor basis;
- e) Sudah memiliki Perda dan pergub tentang Insentif dan kemudahan perijinan penanaman modal.

### **2) Faktor Kelemahan (*Weakness*)**

Permasalahan yang timbul yang akan menjadi penghambat pertumbuhan wilayah, sehingga perkembangan dirasakan kurang terencana dan terkontrol. Adapun faktor kelemahan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Kurangnya informasi bagi investor tentang yang insentif (Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, Retribusi);
- b) Kurangnya informasi bagi investor tentang adanya insentif Pemberian dana stimulan, pemberian modal dan mekanismenya;
- c) Masih terbatasnya Infrastruktur dan sarana prasarana di Provinsi Kalimantan Timur;
- d) Belum efektifnya mengenai waktu dalam penerbitan izin karena masih lama dari waktu yang ditentukan; dan
- e) Masih kurangnya nilai Investasi di sektor pertanian terutama sektor perikanan masih sangat rendah.

#### **3.4.2 Identifikasi Faktor Eksternal**

Faktor Eksternal meliputi penilaian terhadap faktor peluang (*Opportunities*), dan faktor ancaman (*Threats*).

### **1) Faktor Peluang (*Opportunities*)**

Potensi yang dimiliki suatu wilayah, terutama yang cenderung berorientasi pasar bagi pertumbuhan kawasan dimasa datang, sehingga memberikan peluang optimis dalam pengembangannya maupun dalam menarik minat insvestor. Adapun faktor peluang adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 sebagai kepastian hukum bagi investor;
- b) Penambahan dan peningkatan tenaga kerja (Ketersediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja);
- c) Peningkatan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur;
- d) Peningkatan nilai PAD Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka pendek; dan
- e) Keamanan politik dan sosial budaya di Provinsi Kalimantan Timur.

### **2) Faktor Hambatan (*Threats*)**

Potensi yang dimiliki, dapat pula menjadi ancaman bagi daerah yang kurang atau belum mampu / belum siap menerima tekanan perkembangan wilayah di sekitarnya, sehingga berakibat kurang menguntungkan dan pada akhirnya keuntungan akan tersedot oleh daerah-daerah disekitarnya yang sudah siap (modal luar). Seperti kebijakan pembangunan dalam era ekonomi daerah, dimana daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam akan mengalami pengembangan yang signifikan, tetapi akan menimbulkan ancaman atau hambatan apabila suatu daerah tidak hati-hati dalam mengelolanya. Adapun hambatan di Provinsi Kalimantan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya daya saing daerah di luar Provinsi Kalimantan Timur;
- b) Meningkatnya daya saing investasi di negara tetangga;
- c) Rendahnya produktivitas tenaga kerja (SDM) di Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d) Degradasi lingkungan.

Berdasarkan hasil identifikasi dari faktor internal maka disusun pendekatan strategi SWOT untuk menentukan strategi dan arahan kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur.



**Tabel 3. 3 Matriks SWOT**

<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	Sektor Pertambangan menjadi sektor basis (s1)	Kurangnya informasi bagi investor tentang yang insentif (Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, Retribusi) (w1)
	Sektor industri pengolahan menjadi sektor basis (s2)	Kurangnya informasi bagi investor tentang adanya insentif Pemberian dana stimulan, pemberian modal dan mekanismenya (w2)
	Investasi sektor industri pengolahan dan sektor kontruksi efisiensi dalam investasi sektor pada tahun 2016 (s3)	Masih terbatasnya Infrastruktur dan sarana prasaran di Provinsi Kalimantan Timur (w3)
	Sektor kontruksi 5 tahun mendatang akan mampu menjadi sektor basis (s4)	Belum efektifnya mengenai waktu dalam penerbitan izin karena masih lama dari waktu yang ditentukan (w4)
	Sudah memiliki Perda dan pergub tentang Insentif dan kemudahan perijinan penanaman modal (s5)	Masih kurangnya nilai Investasi di sektor pertanian terutama sektor perikanan masih sangat rendah (w5)
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 sebagai kepastian hukum bagi investor (O1)	Arahan pemberian insentif bagi sektor basis pertambangan sesuai dengan peraturan dan UUD yang berlaku (s1,O1)	Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya pemberian kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi (w1,O1)
Penambahan dan peningkatan tenaga kerja (Ketersediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja) (O2)	Arahan pemberian insentif bagi sektor basis industri pengolahan untuk peningkatan jumlah tenaga kerja (s2,O2)	Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya menarik investor dalam menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja (w2,O2)
Peningkatan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (O3)	Arahan investasi bagi sektor industri pengolahan dan kontruksi sebagai sektor yang efisiensi untuk peningkatan nilai PDRB di Provinsi Kalimantan Timur (s3,O3)	Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam upaya peningkatan nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur (w3,O3)

Peningkatan nilai PAD Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka pendek (O4)	Peningkatan investasi sektor kontruksi untuk peningkatan nilai PAD Provinsi Kalimantan Timur (s4,O4)	Komitmen mengenai waktu dalam penerbitan izin dalam upaya menarik investor dalam meningkatkan nilai PAD Provinsi Kalimantan Timur (w4,O4)
Keamanan politik dan sosial budaya di Provinsi Kalimantan Timur (O5)	Sosialisai Perda dan Pergub tentang insentif dan kemudahan sebagai kepastian hukum dan menciptakan kemandirian politik dan sosial budaya bagi investor (s5,O5)	Arahan investasi bagi sektor perikanan dan keamanan politik dan sosial budaya bagi investor di Provinsi Kalimantan Timur (w5,O5)
<b>Hambatan (T)</b>	<b>Strategi (S-T)</b>	<b>Strategi (W-T)</b>
Meningkatnya daya saing daerah di luar Provinsi Kalimantan Timur (t1)	Kemudahan Investasi dan pemberian insentif di setor pertambangan dalam upaya meningkatkan daya saing provinsi kalimantan timur (S1,t1)	Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya peningkatan daya saing provinsi kalimantan timur (w1,t1)
Meningkatnya daya saing investasi di negara tetangga (t2)	Kemudahan Investasi dan pemberian insentif di sektor industri pengolahan dalam upaya menarik investasi di provinsi kalimantan timur sehingga menjadi tujuan investasi (s2,t2)	Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya menarik investor dalam meningkatkan daya saing Provinsi Kalimantan Timur dan tujuan investasi (w2,t2)
Rendahnya produktivitas tenaga kerja (SDM) di Provinsi Kalimantan Timur (t3)	Arahan investasi bagi sektor industri pengolahan dan kontruksi sebagai sektor yang efisiensi untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja (s3,t3)	Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja (w3,t3)
Degradasi lingkungan (t4)	Kemudahan Investasi dan pemberian insentif investasi di bidang kontruksi dan menjaga kondisi lingkungan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur (s4,t4)	Komitmen mengenai waktu dalam penerbitan izin bagi investasi yang berwawasan lingkungan berkelanjutan (w4,t4)



# BAB 4

## STRATEGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

### 4.1 Strategi Pengembangan Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi

Berdasarkan hasil analisis ekonomi dan efisiensi investasi dan strategi SWOT, dapat disimpulkan sektor – sektor yang perlu mendapatkan insentif dan kemudahan investasi untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mewujudkan pemerataan, kemiskinan, dan pengangguran di seluruh kabupaten/kota. Karena Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan tradisional. Karena tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi - tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, disparitas pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Fokus sektor pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur terhadap beberapa sektor yang menjadi potensi di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun yang akan datang dengan melihat trend pada lima tahun sebelumnya, sektor yang menjadi fokus untuk berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi untuk meningkatkan perekonomian dan nilai pendapatan daerah. Sedangkan sektor yang perlu menjadi fokus untuk mewujudkan pemerataan terutama kabupaten yang berada di pinggiran perlu didorong dan diarahkan pada sektor pertanian mengingat perkembangan sektor pertanian terutama sub setor perikanan yang nilai investasinya paling kecil.

**Tabel 4. 1 Tebel Fokus Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Sektor di Provinsi Kalimantan Timur**

No	Sektor	LPE	LQ	Perkembangan Investasi	ICOR	Keterangan
1.	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	Menurun	Non Basis	Menurun dan paling kecil	<i>inefisien</i>	(Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan) secara khusus untuk mencapai pemerataan pembangunan di Daerah pinggiran dan meningkatkan investasi serta pendapatan dari sektor primer.
2.	<b>Pertambangan</b>	<i>Fluktuasi</i>	Sektor Basis	<i>Fluktuasi</i>	<i>Efisien</i>	Sektor Pertambangan perlu mendapatkan fokus khusus dalam pemberian kebijakan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi untuk menjaga setor pertambangan tidak terus mengalami penurunan dan berupaya menciptakan <b>setor pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.</b> sehingga tidak menimbulkan degradasi lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.
3.	<b>Industri Pengolahan</b>	Meningkat	Sektor Basis	Meningkat dan paling besar	<i>Efisien</i>	Sektor Industri Pengolahan perlu mendapatkan fokus utama dalam pemberian kebijakan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur.
4.	<b>Sektor Kontruksi</b>	<i>Fluktuasi</i>	Lima tahun yang akan datang akan menjadi sektor basis	Meningkat	<i>Efisien</i>	Sektor Kontruksi perlu mendapatkan fokus utama selain sektor industri pengolahan dalam pemberian kebijakan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan setor kontruksi

No	Sektor	LPE	LQ	Perkembangan Investasi	ICOR	Keterangan
						sehingga pada lima tahun yang akan datang mampu menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur.
5.	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	Menurun	Non Basis	<i>Fluktuasi</i>	<i>inefisien</i>	Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan di Daerah pinggiran
6.	<b>Perdagangan Besar dan Eceran: Resparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	Menurun	Non Basis	<i>Fluktuasi</i>	<i>inefisien</i>	Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan
7.	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	Menurun	Non Basis	<i>Fluktuasi</i>	<i>inefisien</i>	Pemberian Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan dari sektor transportasi
8.	<b>Real Estate</b>	Menurun	Non Basis	<i>Fluktuasi</i>	<i>inefisien</i>	Pemberian Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan dari sektor real estate
9.	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib</b>	Menurun	Non Basis	<i>Fluktuasi</i>	<i>Efisien</i>	Pemberian Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan dari sektor Administrasi Pemerintahan
10.	<b>Jasa Lainnya</b>	Meningkat	Non Basis	<i>Fluktuasi</i>	<i>inefisien</i>	Pemberian Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan sektor jasa lainnya.

Sumber: Hasil Analisis, 2018

## **4.2 Arahan dan Strategi Kebijakan**

- 1) Memberikan arahan pemberian insentif bagi sektor basis pertambangan, Industri pengolahan, dan konstruksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Sosialisasi Perda dan Pergub tentang insentif dan kemudahan sebagai kepastian hukum dan menciptakan keamanan politik dan sosial budaya bagi investor;
- 3) Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya pemberian kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi;
- 4) Komitmen mengenai waktu dalam penerbitan izin bagi investasi yang berwawasan lingkungan berkelanjutan; dan
- 5) Memberikan arahan investasi bagi sektor perikanan dan keamanan politik dan sosial budaya bagi investor di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1 Strategi Pemberian insentif**

- a Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah terhadap sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertanian, dan setor pertambangan;
- b Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah terhadap industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertanian, dan setor pertambangan; dan
- c Pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah ditujukan kepada pelaku usaha sektor pertanian, kehutanan, dan sektor perikanan.

### **2 Strategi Pemberian kemudahan**

- a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertanian, dan sektor pertambangan. Kemudahan memberikan data dan informasi berupa pemberian kemudahan dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal seperti:
  - ❖ Peta Potensi ekonomi daerah;
  - ❖ Rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan
  - ❖ Rencana Strategis dan Skala Prioritas Provinsi.
- b. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana berupa:

- ❖ Jaringan Listrik
  - ❖ Jaringan jalan
  - ❖ Transportasi
  - ❖ Jaringan telekomunikasi; dan
  - ❖ Jaringan air bersih.
- c. Penyediaan lahan atau lokasi;  
Pemberian kemudahan dalam bentuk lahan atau lokasi diarahkan pada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah (Pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi) dan Sesuai dengan peruntukannya dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau  
Pemberian kemudahan kepada usaha setor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli.
- e. Percepatan pemberian perizinan.  
Bentuk percepatan pemberian perijinan dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi online.

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2017. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor Tahun 2016.*
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Provinsi Kalimantan Dalam Angka 2017.*
- Luntungan, A. Y. (2008). Analisis investasi dan pertumbuhan ekonomi di kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 48-62.
- Mulyadi deddy, 2015 *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* . Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka
- Rustiono, D. (2008). *Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Tesis. Magister Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang.*



- Sitompul, N. L. (2007). Analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sodik, J., & Nuryadin, D. (2005). Investasi dan pertumbuhan ekonomi regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 157-170.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali.
- Syaihu Akhmad, (2012). *Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10(1),
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Ed.VII). Jakarta: Erlangga.